



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAH

Puja Rizqy Ramadhan¹, Fitri Yani Panggabean², Nia Pratiwi Lubis³

Universitas Pembangunan Panca Budi
pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to empirically prove the effect of the suitability of compensation, law enforcement and organizational commitment to fraud in the government sector. This research was conducted at the Binjai City Regional Work Unit (SKPD). This study uses a quantitative associative research type. The data analysis using multiple linear regression analysis. The basis for sampling in this study using purposive sampling with a sample size of 60 employees. The results of this study indicate that the suitability of compensation has a significant positive effect on fraud in the government sector. Law enforcement has a significant positive effect on fraud in the government sector. Organizational commitment has a significant positive effect on fraud in the government sector. Meanwhile, the suitability of compensation.

Kata kunci: *compensation, law enforcement, organizational commitment, fraud*

PENDAHULUAN

Fraud dapat terjadi di sektor swasta dan sektor publik seperti instansi pemerintah, dimana pelakunya adalah pegawai pihak di dalam maupun di luar organisasi. Fraud lebih sering terjadi pada instansi pemerintah karena organisasi memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, pengendalian yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah terkait dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu yang fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang berkembang di masyarakat saat ini. Menurut UU 31/1999 jo UU No 20/2001, korupsi ada tujuh jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan jabatan, pemerasan, penipuan,

Menurut Transparency International berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 176 negara, Indonesia menempati peringkat 90 karena korupsi peringkat pertama justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan tidak lagi hanya manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, mark-up pengadaan barang dan penggelapan pajak.

Berdasarkan Rule of Law Index 2019 yang dikeluarkan oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 pada skala 0-1. Sementara dari sisi pemberantasan korupsi, Indonesia menempati urutan ke-97 dari 126 negara dengan skor 0,38 dari skala 0-1. Di tingkat regional, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara terkait parameter bebas korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 seperti: (1) Kasus dugaan korupsi penerbitan IUP di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan Bupati Supian Hadi dan merugikan negara sebesar Rp. IUP seluas 400 hektar di Jambi melibatkan anak perusahaan PT Antam,

Kota Binjai merupakan daerah yang memiliki kasus penyimpangan yang melibatkan pejabat daerah yang aktif. Berdasarkan data TribunMedan.com, ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kota Binjai. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana pengadaan alat peraga untuk sekolah dasar di seluruh kota Binjai.



Anggaran yang membengkak mencapai Rp. 1,2 Milyar, modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan menggelembungkan dana atau mark-up hingga pengadaannya fiktif. Selain itu, contoh kasus lain yang terjadi adalah kasus korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Djoelham, Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan total kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar (antaranews.com, 2019).

Dalam melakukan fraud, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beragam. Dari beberapa kasus terlihat bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi. Ketiga hal tersebut dapat memicu terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah, salah satu penyebab perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi yang mereka terima tidak manusiawi, sehingga ketidakpuasan akibat kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang membosankan. juga dapat mendukung insiden. kejadian pencurian oleh pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, dan persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja.

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk menegakkan atau benar-benar berfungsi norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Biasanya hal ini terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, tidak disiplin, tidak adanya mekanisme audit, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis di antara karyawan. Diantara unsur fraud diamond lainnya, opportunity merupakan unsur yang paling mungkin diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan deteksi dini fraud.

Selain kedua faktor di atas, fraud juga dipengaruhi oleh justifikasi komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah rasa identifikasi, keyakinan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang diungkapkan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi mencakup sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengeluarkan upaya tingkat tinggi untuk kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi objek dalam penelitian ini meliputi pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai, Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dimana tidak dilakukan generalisasi terhadap sampel yang diambil. Teknik purposive sampling lebih banyak digunakan pada penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.



3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang pertanggungjawaban anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linier berganda yang bertujuan untuk menjelaskan kekuatan dan pengaruh beberapa variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dengan uji parsial dan uji simultan sebagai pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian parsial yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
1 (Constant)	12.036	4,529		2,658	.013
Compensation Suitability	.408	-.121	.422	3,842	.000
Law enforcement	.332	.105	.395	2,659	.010
Organizational Commitment	.350	.096	.432	3,655	.001

a. Dependent Variable: Fraud_in_Sector_Government

Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kesesuaian kompensasi memiliki thitung sebesar 3,842 dengan taraf signifikansi 0,000 dan t-tabel sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Secara teoritis, kompensasi atau gaji merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) yang menyatakan bahwa, "Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud di pemerintahan Salatiga". Apabila kompensasi yang diterima pegawai sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pegawai, maka akan meminimalisir terjadinya gratifikasi atau penyelewengan dana pemerintah sehingga tidak terjadi kecurangan di sektor pemerintahan. Secara teori, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk menegakkan atau benar-benar berfungsinya norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Variabel penegakan hukum memiliki nilai thitung sebesar 2,659 dengan taraf signifikansi 0,010 dan ttabel sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan besar positif 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan variabel penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek Faisal (2013) yang menyatakan bahwa, "Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan". Jika setiap pegawai divisi internal organisasi mentaati dan mentaati segala peraturan dan kode etik yang berlaku, maka tidak akan terjadi kasus penyalahgunaan dana pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak terkait.



Variabel komitmen organisasi memiliki thitung sebesar 3,655 dengan taraf signifikansi 0,001 dan t tabel sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan variabel komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Secara teori, komitmen organisasional adalah individu yang memiliki keinginan untuk bertindak secara etis terhadap organisasinya dengan tujuan menciptakan tujuan yang diinginkan untuk kepentingan organisasi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa, “Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan”. Setiap organisasi memiliki komitmen yang telah ditetapkan, oleh karena itu pimpinan organisasi dan pegawai di bidang keuangan harus mengikuti aturan dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyelewengan dana yaitu penyelewengan di bidang pemerintahan.

Jadi, berdasarkan hasil uji regresi parsial pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi (X_1), penegakan hukum (X_2) dan komitmen organisasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan (Y). Sedangkan pengujian simultan yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji F
ANOVA**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323,038	3	77,494	15,162	.000b
	Residual	65,628	59	5.111		
	Total	388,667	60			

Dependent Variable: Fraud_in_Sector_Government

Predictors: (Constant), KK, PH, KO

Setelah dilakukan uji F didapatkan nilai F . diperoleh hitungan dan nilai signifikansi. Nilai Fhitung sebesar 14,304 sedangkan Ftabel sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan = 0,05 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian, H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kesesuaian kompensasi (X_1), penegakan hukum (X_2), dan komitmen organisasi (X_3) yang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan (Y). Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa taraf signifikansi $0,000 <$ dari taraf yang ditentukan = 0,05 menunjukkan bahwa X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y .

Secara teori, kecurangan yang paling umum di sektor pemerintahan adalah korupsi. Pada umumnya korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik untuk keuntungan pribadi. Korupsi di tingkat pemerintah daerah adalah dari sisi menerima, memeras suap, memberikan perlindungan, pencurian barang publik untuk keuntungan pribadi. Jika seluruh pegawai bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai menerima kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, maka kecil kemungkinan terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan. Selain itu, akan lebih baik jika penegakan hukum dilaksanakan dengan baik agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadinya.

Terkait dengan fraud di sektor pemerintahan, komitmen organisasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur utama bagi setiap pegawai di departemen keuangan untuk mengelola



keuangan pemerintah dengan baik dan bertanggung jawab. Kasus korupsi dalam pemerintahan terjadi karena adanya peluang, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk keuntungan pribadi. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 14,304 sedangkan Ftabel sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan = 0,05 sehingga Fhitung > Ftabel. Dengan demikian, H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), dan komitmen organisasi (X3) secara bersama-sama terhadap fraud di sektor tersebut. pemerintah (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
2. Penegakan hukum (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan (Y) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
3. Komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pada sektor pemerintahan (Y) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Binjai.
4. Kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pada sektor pemerintahan (Y) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah Yahya, Brendo Butar-Butar. (2019). Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi dan Arus Kas Pendanaan terhadap Return Saham. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*-Vol 4 No. 1 – Juni 2019.
- Aditya, I. 2013. "Persepsi Pegawai Negeri" *Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintah*. *Akuntansi Jurnal Analisis* JJ 2 (1).
- Gbegi, D, O., Adebisi, JF 2015. "Analisis Deteksi Dan Pencegahan Fraud *Strategi Di Sektor Publik Nigeria* ". *Journal of Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan di Afrika*(JGGSDA), Jilid 2, No 4.
- Putri Mustikasari. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Batang". *Jurnal Analisis Akuntansi AAJ 2*
- Najahningrum. 2013 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tren *Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*". Simposium Akuntansi Nasional XVI Manado.
- Pramudita, A. 2013. "Analisis Fraud di Sektor Pemerintah Kota Salatiga". *Jurnal Analisis Akuntansi AAJ 2* (1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.*
- Soekanto, Soejono. 2017. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta: Pers Rajawali.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (12 th). Bandung: Alfabeta.
- Sulastris & Simanjuntak Binsar. 2014. "Penipuan di sektor pemerintah *berdasarkan faktor keadilan kompensasi, sistem pengendalian intern, dan etika pemerintahan organisasi (studi empiris layanan pemerintah provinsi) DKI Jakarta*". Jakarta: Jurnal Universitas Negeri Jakarta.



- Tunggal, A. 2011. "Teori dan Kasus Audit Internal". Jakarta: Harvard. Tuanakotta, Theodorus M. 2010. "Akuntansi Forensik & Audit Investigasi". Jakarta. Salemba Empat.
- Usman, Syahriani. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintah". Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar.